

NOMOR SOP	: POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.103.01
TGL. PEMBUATAN	: 22 JUNI 2018
NO & TGL. REVISI	: 00
TGL. EFEKTIF	: 25 JUNI 2018
DISAHKAN OLEH	KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG : I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM
NAMA SOP	: MENYAKSIKAN PEMUSNAHAN
KUALIEUKACI DELAI	COANA

DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- Inspektur yang telah mengikuti pelatihan terkait pengawasan di Bidang Obat dan Makanan
- 2. Pramubakti, namun dengan supervisi inspektur
- 3. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.
- 4. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pengawasan.



dijalankan sebagaimana mestinya, maka misi BPOM untuk	bahan referensi.
melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak	
memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu dan	
penandaan akan terganggu.	



KODE SOP : POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : MENYAKSIKAN PEMUSNAHAN

HALAMAN : 4 dari 4

A. Diagram Alir

No No		Pelaksana				Mutu Baku			
	Aktivitas	Pemilik/Penanggung Jawab Sarana	Ka Balai	Ka Bid	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan surat permohonan untuk menyaksikan pemusnahan		-			Surat Permohonan		-	Surat dilengkapi dengan rencana pemusnahan dan jumlah barang yang akan dimusnahkan
2	Menerima surat permohonan dan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang					-	5 HK	Disposisi	
3	Berkoordinasi dengan pemilik/penanggung jawab sarana untuk memastikan jadwal pemusnahan	□				-	5 HK	Jadwal Pemusnahan	Koordinasi terkait kepastian lokasi, waktu, dan metode pemusnahan serta jumlah barang yang akan dimusnahkan
4	Menugaskan petugas untuk menyaksikan pemusnahan					-	sesuai hasil koordinasi	Surat Tugas	Petugas adalah personil di bidang pemeriksaan termasuk pramubakti. Penugasan pramubakti harus disertai dengan petugas pemeriksaan
5	Menyaksikan pemusnahan					-	1 HK	Berita Acara Pemusnahan Dokumentasi Pemusnahan	Dilakukan pengecekan terhadap kebenaran jenis dan jumlah barang yang dimusnahkan
6	Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan					Berita Acara Pemusnahan Dokumentasi pemusnahan		Laporan Berita Acara Pemusnahan Dokumentasi Pemusnahan	Laporan pemusnahan disampaikan kepada Direktorat yang terkait sarana yang melakukan pemusnahan



KODE SOP : POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : MENYAKSIKAN PEMUSNAHAN

HALAMAN : 5 dari 5

B. Deskripsi/PengertianUmum

1. Sarana adalah sarana produksi dan distribusi bahan baku obat, obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, prekursor (NPP), pangan, obat Tradisional, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan.serta sarana pelayanan kefarmasian.

- 2. Petugas adalah inspektur di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan termasuk Pramubakti.
- 3. Jadwal pemusnahan adalah waktu pemusnahan yang disepakati bersama dengan penanggung jawab sarana dan pihak ke-3 tempat dilakukan pemusnahan (jika ada).
- 4. Berita Acara Pemusnahan adalah yaitu suatu dokumen yang berisi catatan kegiatan pemusnahan yang mencakup metode, waktu, pelaksana dan saksi pemusnahan termasuk jumlah barang yang dimusnahkan.
- 5. Dokumentasi pemusnahan adalah rekaman kegiatan pemusnahan berupa foto dan dokumen pendukung lainnya

C. Pihak yang Terkait

Kepala BPOM.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Deputi Bidang Penindakan.

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.



KODE SOP : POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : MENYAKSIKAN PEMUSNAHAN

HALAMAN : 6 dari 6

Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru.

Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang.

BalaiBesar/Balai POM lain.

D. Formulir yang Digunakan

E. Output yang Dihasilkan

1. Berita Acara Pemusnahan



KODE SOP : POM-03.01/CFM.01/SOP.01/IK.103.01

NAMA SOP : MENYAKSIKAN PEMUSNAHAN

HALAMAN : 7 dari 7

F. Bagan Proses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-03 PENGAWASAN/PEMERIKSAAN PRODUK DAN SARANA/FASILITAS PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN PELAYANAN OBAT DAN MAKANAN POM-01 POM-04 POM-01 POM-06 POM-03.01 Pengawasan Sarana/ Pengelolaan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan dan Fasilitas Produksi dan Pengelolaan Pengujian Pembinaan, Bimbingan dan Peraturan Perundang-Peraturan Perundang-Distribusi Obat dan Teknis, Fasilitasi Pelaku Obat dan Makanan Undangan Undangan Makanan serta Pelayanan Usaha Obat dan Makanan Kefarmasian POM-07 POM-08 POM-06 POM-08 POM-03.02 Hubungan Masyarakat Riset dan Kajian Obat dan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informasi, Pengelolaan Pengujian Makanan Edukasi dan Komunikasi Informasi, Obat dan Makanan Pengawasan Produk Obat Edukasi dan Makanan POM-09 POM-09 Pengelolaan Data dan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Teknologi Informasi POM-03.03 Komunikasi Komunikasi Pengawasan Informasi dan Promosi Obat dan Makanan POM-02 Pelaku Usaha POM-02 Pelaku Usaha POM-05 Registrasi dan Evaluasi Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/ POM-03.04 Produk dan Sarana/ Masyarakat Fasilitas Produksi dan Masyarakat Fasilitas Produksi dan Penindakan Distribusi Obat dan Pengawasan Informasi Distribusi Obat dan Makanan dan Promosi Produk Makanan Pemerintah Tembakau Pemerintah